

# DINAMIKA KOLABORASI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA KREATIF GASTRONOMI DI KOTA SALATIGA

Shafa Elmira Aziza, R. Slamet Santoso

**Program Studi S1 Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
**Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275**  
**Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405**  
**Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id>**  
**email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

---

## **ABSTRACT**

*The City of Salatiga has strong potential in gastronomic tourism, reflected in its nomination for the UNESCO Creative Cities Network under the Creative City of Gastronomy category. Its development is guided by the 2021–2026 RIPPARDA and involves multi-actor collaboration among government, academia, communities, media, financial institutions, and businesses. However, collaboration dynamics remain suboptimal, hindering the realization of this goal. This study aims to analyze collaboration dynamics and identify driving and inhibiting factors in gastronomic tourism development. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The study applies Collaborative Governance theory by Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh (2012), focusing on principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action. Findings show that collaboration is constrained by weak communication, top-down approaches, and limited trust and commitment. Key barriers include unequal resources, hierarchical institutional structures, and political changes, while cultural flexibility acts as a supporting factor. The study recommends strengthening inclusive communication, shared commitment, resource allocation, accountability systems, and coordination mechanisms to improve sustainable collaboration.*

**Keywords: Tourism, Collaboration, Gastronomy, Actors**

## **ABSTRAK**

Kota Salatiga memiliki potensi yang kuat dalam bidang pariwisata kuliner, yang tercermin dari pencalonannya dalam Jaringan Kota Kreatif UNESCO pada kategori Kota Kreatif di Bidang Gastronomi. Pengembangan potensi ini dipandu oleh RIPPARDA 2021–2026 dan melibatkan kolaborasi multipihak antara pemerintah, akademisi, masyarakat, media, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. Namun, dinamika kolaborasi masih belum optimal, sehingga menghambat pencapaian tujuan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kolaborasi serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan pariwisata kuliner. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh (2012), yang berfokus pada keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk bertindak bersama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dibatasi oleh komunikasi yang lemah, pendekatan top-down, serta kepercayaan dan komitmen yang terbatas. Hambatan utama

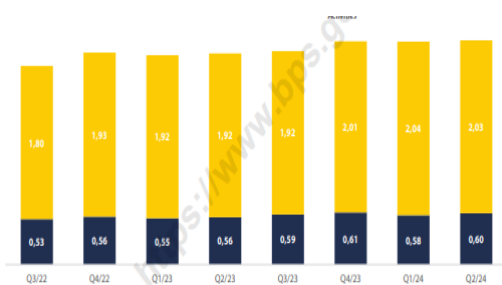
meliputi ketidaksetaraan sumber daya, struktur kelembagaan yang hierarkis, dan perubahan politik, sementara fleksibilitas budaya berperan sebagai faktor pendukung. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komunikasi inklusif, komitmen bersama, alokasi sumber daya, sistem akuntabilitas, dan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kolaborasi yang berkelanjutan.

**Kata kunci: Pariwisata, Kolaborasi, Gastronomi, Aktor**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengembangan pariwisata menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah, termasuk di Kota Salatiga yang memiliki potensi besar di bidang kuliner atau gastronomi. Sektor pariwisata tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan UMKM.



**Gambar 1.1 Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDB (persen), 2022–2024**

Sumber: *Badan Pusat Statistik*

Data menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu penyumbang penting dalam

perekonomian Kota Salatiga dengan kontribusi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata, khususnya gastronomi, memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi lokal.

Dinamika kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media menjadi kunci dalam pengembangan pariwisata Kota Kreatif Gastronomi. Pemerintah Kota Salatiga telah melakukan berbagai upaya seperti penyelenggaraan event gastronomi, pengembangan kawasan kuliner, serta promosi melalui media digital. Selain itu, adanya upaya untuk mendorong Salatiga masuk dalam jaringan kota kreatif menunjukkan komitmen dalam membangun kolaborasi multipihak. Namun, implementasi kolaborasi ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya koordinasi antar aktor, keterbatasan

sumber daya, serta belum adanya pembagian peran yang jelas dalam pelaksanaan program.

Permasalahan lain yang muncul adalah rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap konsep kota gastronomi, yang berdampak pada rendahnya partisipasi dalam program pengembangan pariwisata. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya promosi dan sosialisasi, informasi yang disampaikan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan di bidang pariwisata dan gastronomi, turut menghambat optimalisasi pengembangan sektor ini.

Di sisi lain, tantangan juga terlihat pada aspek koordinasi dan pemanfaatan sumber daya dalam proses kolaborasi. Mekanisme koordinasi antar lembaga dinilai belum berjalan efektif, sehingga menghambat aliran informasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Selain itu, keterbatasan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta dukungan terhadap UMKM lokal menyebabkan potensi pariwisata gastronomi belum

dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan serta daya saing pariwisata Kota Salatiga.

Sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan, maka diperlukan penelitian yang mampu menganalisis lebih lanjut bagaimana dinamika kolaborasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata Kota Salatiga untuk mewujudkan Kota Gastronomi Salatiga dan apa faktor-faktor yang penghambat proses *collaborative governance* yang telah terjadi, oleh karena itu timbul pertanyaan penelitian “**Mengapa dinamika kolaborasi dalam Pengembangan Pariwisata Kota Gastronomi di Kota Salatiga belum optimal?**”. Kemudian maka penelitian ini berjudul “Dinamika Kolaborasi dalam Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga”.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana dinamika kolaborasi antar aktor dalam pengembangan Pariwisata Gastronomi di Kota Salatiga?
- b. Apa faktor yang menghambat dan mendorong kolaborasi dalam

pengembangan Pariwisata  
Gastronomi di Kota Salatiga?

### C. Tujuan

- a. Menganalisis dinamika kolaborasi antar aktor dalam pengembangan Pariwisata Gastronomi di Kota Salatiga.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mendorong kolaborasi dalam pengembangan Pariwisata Gastronomi di Kota Salatiga.

### D. Kajian Teori

#### Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan proses kerja sama antara individu atau lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien (Pasolong, 2007), yang mencakup fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengambilan keputusan, koordinasi, hingga pengawasan (Caiden, 1982). Selain itu, administrasi publik berfokus pada pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan (Hughes, 1994), serta mengintegrasikan dan mengoordinasikan sumber daya

publik dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan (Chandler dan Plano, 1998). Dengan demikian, administrasi publik dapat dipahami sebagai perpaduan antara teori dan praktik yang menggabungkan aspek manajerial dengan nilai-nilai sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### Manajemen Publik

Manajemen publik pada dasarnya menekankan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan prinsip-prinsip manajerial. Perkembangannya terlihat dari penerapan prinsip klasik seperti POSDCORB, hingga munculnya pendekatan modern seperti New Public Management yang berorientasi pada kinerja, efisiensi, dan praktik sektor swasta, serta Total Quality Management yang menekankan kualitas dan partisipasi organisasi. Secara keseluruhan, manajemen publik terus berkembang dari model birokratis menuju pendekatan yang lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi hasil dalam meningkatkan kinerja sektor publik. Selain itu, manajemen publik juga menempatkan pemerintah sebagai

aktor utama dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan pembangunan. Dengan demikian, manajemen publik menjadi instrumen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

### ***Collaborative Governance***

Teori *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh (2012) merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Model *Collaborative Governance* dari Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh menempatkan dinamika kolaborasi sebagai inti proses kolaborasi yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

(1) Penggerakan prinsip bersama, yaitu proses membangun kesepakatan melalui dialog,

deliberasi, dan penetapan tujuan serta nilai bersama antar aktor;

(2) Motivasi bersama, yang mencerminkan adanya kepercayaan, pemahaman yang selaras, legitimasi internal, dan komitmen antar pihak untuk terus terlibat dalam kolaborasi;

(3) Kapasitas tindakan bersama, yaitu kemampuan aktor dalam merealisasikan kolaborasi melalui dukungan prosedur dan kesepakatan, kepemimpinan, pengetahuan, serta ketersediaan sumber daya. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan menentukan efektivitas proses kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.

Pada penelitian ini, akan menggunakan model *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika proses kolaborasi antar aktor dalam pengembangan pariwisata gastronomi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dinamika kolaborasi dalam pengembangan pariwisata gastronomi di Kota Salatiga. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman

mendalam mengenai interaksi antar aktor, seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam kerangka *collaborative governance*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan melibatkan informan kunci seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga serta aktor lain yang ditentukan melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi pengembangan wisata gastronomi, sedangkan dokumentasi mencakup kebijakan, laporan, dan data pendukung lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola serta faktor yang memengaruhi efektivitas kolaborasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penggerakan Prinsip Bersama

Penggerakan prinsip bersama merupakan unsur dinamika kolaborasi yang melihat penegasan kembali tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip bersama yang terjadi secara berkelanjutan yang diungkapkan oleh aktor-aktor yang terlibat dari berbagai macam perspektif. Inti dari penggerakan prinsip bersama adalah penyatuan

prinsip antar aktor yang terlibat. Komponen penggerakan prinsip bersama terdiri dari tiga komponen, yaitu pengungkapan, deliberasi, dan determinasi:

#### a. Pengungkapan

Proses pengungkapan (*discovery*) dalam *collaborative governance* Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga menunjukkan bahwa para aktor seperti pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan pihak lainnya telah menyatakan alasan, kepentingan, serta tujuan mereka dalam bergabung, misalnya pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, akademisi untuk penelitian dan pengabdian, serta pelaku usaha untuk promosi dan pengembangan bisnis. Namun, dalam praktiknya proses ini belum berjalan optimal karena komunikasi yang terjadi masih cenderung satu arah dan didominasi oleh pemerintah sebagai leading sector, sehingga kepentingan aktor lain belum sepenuhnya terakomodasi. Hal ini terlihat dari keterbatasan peran komunitas dan akademisi yang belum dilibatkan secara strategis dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta belum adanya forum dialog yang

berkelanjutan untuk menyelaraskan kepentingan bersama. Akibatnya, *shared meaning* belum terbentuk secara maksimal dan kolaborasi masih bersifat top-down, terutama pada tahap awal (*discovery*) yang diinisiasi melalui program Salatiga menuju UNESCO Creative Cities Network. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi dua arah yang lebih setara dan partisipatif agar keselarasan tujuan antar aktor dapat tercapai sesuai prinsip *collaborative governance*.

b. Deliberasi

Proses deliberasi dalam *collaborative governance* Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga menunjukkan bahwa ruang diskusi antaraktor sebenarnya sudah terjadi dan berlangsung terbuka, namun belum berjalan optimal. Diskusi atau musyawarah umumnya hanya dilakukan pada momen tertentu dan belum bersifat rutin maupun berkelanjutan, serta masih bergantung pada inisiatif pihak tertentu, terutama pemerintah. Selain itu, partisipasi aktor belum merata dan komitmen yang berbeda-beda menyebabkan forum diskusi tidak berjalan maksimal. Permasalahan lain yang muncul

adalah diskusi sering kali hanya sebatas menampung pendapat tanpa diikuti dengan tindak lanjut atau penyelesaian masalah, sehingga tidak menghasilkan keputusan yang konkret. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses deliberasi masih lemah, ditandai dengan kurangnya keberlanjutan dialog, rendahnya komitmen aktor, serta ketimpangan keterlibatan, yang pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan kolaborasi dan pembentukan deliberasi yang berkualitas.

c. Determinasi

Proses determinasi dalam *collaborative governance* Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga menunjukkan bahwa upaya pengambilan keputusan bersama sebenarnya sudah dilakukan melalui forum diskusi seperti FGD, namun belum berjalan optimal. Diskusi yang dilakukan masih bersifat event-driven dan belum menghasilkan kesepakatan bersama yang jelas, rencana aksi, maupun komitmen berkelanjutan antaraktor. Selain itu, tidak terdapat mekanisme tindak lanjut atau *feedback* yang memastikan bahwa hasil diskusi dapat diimplementasikan secara konkret. Kondisi ini menyebabkan

belum terbentuknya tujuan bersama (*shared goals*) yang terdefinisi dengan baik, sehingga arah kolaborasi menjadi tidak fokus, tidak terukur, dan mudah terhenti ketika terjadi perubahan. Dengan demikian, proses determinasi masih lemah karena belum mampu menghasilkan keputusan substantif dan komitmen kolektif yang menjadi dasar keberlanjutan kolaborasi.

**b. Motivasi Bersama**

Motivasi bersama dapat diartikan sebagai upaya penguatan siklus yang terdiri dari elemen-elemen seperti kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen dimana elemen tersebut mampu meningkatkan motivasi aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi agar kolaborasi dapat dijalankan dengan maksimal.

**a. Kepercayaan Bersama**

Kepercayaan bersama dalam *collaborative governance* Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga belum terbentuk secara optimal karena interaksi antaraktor masih terbatas, tidak konsisten, dan kurang bersifat timbal balik. Meskipun pemerintah telah

berupaya membangun kepercayaan dengan memberi ruang partisipasi dan komunikasi, proses ini masih didominasi oleh inisiatif pemerintah dan belum diimbangi oleh keterlibatan aktif dari aktor lain. Akibatnya, masih muncul kondisi di mana masing-masing aktor berjalan sendiri-sendiri, terjadi tumpang tindih program, serta perbedaan pemahaman karena kurangnya komunikasi terbuka. Selain itu, keterlibatan aktor non-pemerintah yang masih sebatas sebagai pelaksana kegiatan tanpa peran dalam perencanaan juga menyebabkan tingkat kepercayaan yang terbentuk masih rendah dan rapuh. Dengan demikian, kepercayaan bersama belum berkembang secara kuat karena kurangnya interaksi yang intens, konsistensi, serta dukungan platform kolaboratif yang mendorong komunikasi dan keterlibatan yang setara antaraktor.

**b. Pemahaman Bersama**

Pemahaman bersama dalam *collaborative governance* Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga belum terbentuk secara optimal meskipun telah ada upaya melalui forum diskusi seperti FGD. Proses

tersebut masih bersifat formal dan belum diikuti dengan mekanisme umpan balik serta integrasi berbagai perspektif secara berkelanjutan, sehingga perbedaan pandangan antaraktor belum dapat diselaraskan. Secara umum, aktor memiliki pemahaman dasar yang sama mengenai Salatiga sebagai kota kuliner, namun terjadi perbedaan penafsiran ketika diarahkan menjadi kota gastronomi, yang menunjukkan belum adanya kesepahaman substantif. Selain itu, penerimaan terhadap keputusan bersama cenderung bersifat prosedural, bukan berdasarkan pemahaman yang mendalam, yang tercermin dari program yang masih fokus pada pameran dan sosialisasi tanpa arah pengembangan yang jelas dan terintegrasi. Dengan demikian, kurangnya dialog yang mendalam, kepercayaan, serta mekanisme koordinasi yang berkelanjutan menjadi faktor utama belum tercapainya pemahaman bersama dalam kolaborasi tersebut.

c. Legitimasi Internal

Legitimasi internal dalam *collaborative governance* Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga belum terbentuk secara merata di

antara para aktor. Pemerintah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, relatif memiliki legitimasi lebih kuat melalui mekanisme monitoring dan evaluasi, sementara aktor komunitas dan akademisi masih memiliki keterbatasan pengakuan serta lebih mengandalkan mekanisme internal masing-masing. Keterlibatan aktor non-pemerintah juga cenderung belum setara dan masih terbatas pada peran tertentu, sehingga belum sepenuhnya diakui sebagai mitra strategis dalam kolaborasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan pengakuan antaraktor belum optimal, yang dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi dua arah, minimnya forum dialog yang konsisten, serta belum adanya ruang kolaborasi yang inklusif. Akibatnya, legitimasi internal belum mampu mendukung keterlibatan yang berkelanjutan dan memperkuat motivasi bersama dalam mencapai tujuan kolaborasi.

c. **Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama**

Unsur kapasitas melakukan tindakan bersama dapat diartikan sebagai suatu hasil dari berbagai elemen-elemen lintas fungsional

untuk menghasilkan tindakan yang efektif karena adanya kapasitas yang memadai dari aktor-aktor yang terlibat. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dirancang dalam kerangka yang menggabungkan prosedur dan peraturan, serta sumber daya manusia dimana kondisi ini berdasarkan sering terjadinya perbedaan dan ketimpangan kekuatan dalam kolaborasi, sehingga dibutuhkan kapasitas untuk bertindak bersama.

- a. **Prosedur dan Kesepakatan Bersama**  
Dalam *collaborative governance* Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga, sebenarnya telah terdapat landasan hukum yang cukup lengkap baik di tingkat nasional maupun daerah sebagai payung pelaksanaan kolaborasi. Namun, regulasi tersebut belum diikuti dengan prosedur operasional yang jelas dan terintegrasi untuk mengatur mekanisme kerja sama, pembagian peran, serta pengambilan keputusan bersama antaraktor. Akibatnya, kesepakatan yang terjadi masih bersifat informal, tidak terdokumentasi, dan cenderung bergantung pada kebutuhan kegiatan tertentu, bukan pada perencanaan strategis jangka

panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum sudah tersedia, pelaksanaan kolaborasi belum memiliki pedoman yang kuat dan sistematis, sehingga menghambat terbentuknya kolaborasi yang terarah, setara, dan berkelanjutan.

- b. **Kepemimpinan**

Kepemimpinan dalam *collaborative governance* Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga sudah bersifat terdistribusi sesuai model Hexa Helix, di mana setiap aktor memiliki peran dan koordinator masing-masing, dengan pemerintah sebagai leading sector. Namun, peran kepemimpinan tersebut belum berjalan optimal karena tidak adanya koordinator pusat atau tokoh kunci yang mampu mengintegrasikan seluruh aktor, serta masih rendahnya proaktivitas pemimpin dalam mendorong kolaborasi. Akibatnya, koordinasi lintas sektor masih lemah dan masing-masing aktor cenderung berjalan sendiri, sehingga sinergi program belum tercapai secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur kepemimpinan sudah terbentuk, fungsi kepemimpinan

sebagai pengarah, fasilitator, dan penguat komitmen bersama dalam kolaborasi masih belum optimal.

c. Pengetahuan

Pengetahuan dalam *collaborative governance* Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga sebenarnya sudah cukup baik di tingkat pelaku inti seperti UMKM dan komunitas yang telah memahami konsep gastronomi melalui pelatihan dan praktik. Namun, distribusi pengetahuan tersebut belum merata, terutama kepada masyarakat umum dan sebagian aparatur, sehingga masih terjadi perbedaan pemahaman dan kecenderungan memaknai gastronomi hanya sebagai kuliner. Selain itu, kegiatan berbagi pengetahuan seperti seminar dan festival masih lebih berfokus pada promosi daripada edukasi yang menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pengetahuan dalam kolaborasi sudah berkembang tetapi belum optimal, sehingga masih diperlukan penguatan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih sistematis agar seluruh aktor memiliki pemahaman yang sama dan dapat mendukung kolaborasi secara efektif.

d. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya dalam *collaborative governance* Pengembangan Pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Kota Salatiga masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi pendanaan, sumber daya manusia, maupun pemanfaatannya. Dukungan anggaran pemerintah cenderung terbatas akibat kebijakan efisiensi, sehingga pelaksanaan program banyak bergantung pada sumber alternatif seperti sektor swasta, yang berdampak pada ketidakstabilan kegiatan. Selain itu, keterbatasan kapasitas dan jumlah SDM, serta ketidaksesuaian pelibatan aktor dengan bidang keahliannya, menyebabkan potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan sumber daya yang dapat menghambat efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi, sehingga diperlukan upaya penguatan kapasitas, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan sumber daya yang lebih tepat agar kolaborasi dapat berjalan lebih optimal.

**d. Faktor Budaya**

Faktor pendorong; fleksibilitas aktor yang tidak bergantung pada

prosedur kaku, sehingga kolaborasi dapat berjalan lebih cepat, adaptif, dan berorientasi pada hasil melalui komunikasi informal dan praktik yang pragmatis.

Faktor penghambat: partisipasi stakeholder yang belum terintegrasi, karena masih bersifat parsial, tidak konsisten, dan cenderung dipengaruhi kepentingan masing-masing aktor serta lemahnya koordinasi kolektif.

**e. Faktor Institusi**

Faktor pendorong: Kolaborasi didukung oleh struktur yang lebih horizontal dan fleksibel serta adanya transparansi melalui publikasi laporan, yang membantu membangun kepercayaan antaraktor.

Faktor penghambat: Kolaborasi terhambat oleh dominasi struktur hierarkis pemerintah, ketimpangan peran aktor, serta akuntabilitas yang masih bersifat vertikal dan kurang melibatkan pihak non-pemerintah.

**f. Faktor Sumber Daya**

Faktor pendorong: Didukung oleh keberadaan SDM dan pelatihan, serta sumber pendanaan mandiri dan jejaring yang membantu keberlanjutan kolaborasi.

Faktor penghambat: Terhambat oleh keterbatasan kualitas SDM dan

ketimpangan pendanaan antaraktor, sehingga memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi.

**g. Faktor Lingkungan**

Faktor pendorong: Kolaborasi didukung oleh kejelasan visi dan tujuan sejak awal, seperti pengembangan usaha lokal dan pencapaian kota kreatif gastronomi, yang memberikan arah dan memperkuat sinergi antaraktor.

Faktor penghambat: Kolaborasi terhambat oleh dinamika politik, terutama perubahan kepemimpinan dan pergeseran prioritas kebijakan, yang menyebabkan ketidakkonsistenan program dan mengganggu keberlanjutan kolaborasi.

**KESIMPULAN**

Dinamika kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Kota Kreatif Gastronomi di Salatiga menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan optimal meskipun telah memiliki dasar kelembagaan. Berdasarkan model Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh, komponen kapasitas tindakan bersama sudah cukup berkembang melalui adanya struktur, regulasi, dan kerangka kolaborasi berbasis hexa helix. Namun, komponen penggerakan prinsip bersama dan motivasi bersama masih lemah,

ditandai dengan komunikasi yang belum efektif, relasi yang tidak setara, perbedaan pemahaman, serta rendahnya kepercayaan dan komitmen antar aktor, sehingga menghambat terbentuknya kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan.

Sementara itu, faktor penghambat kolaborasi berasal dari aspek sumber daya, institusi, dan lingkungan, seperti ketimpangan pendanaan, struktur kelembagaan yang masih hierarkis, serta perubahan kebijakan akibat dinamika politik yang memengaruhi konsistensi program. Adapun faktor pendorong utama terletak pada aspek budaya, yaitu adanya visi awal yang cukup jelas, dukungan sumber daya manusia, serta fleksibilitas koordinasi melalui komunikasi langsung dan media digital. Faktor ini menjadi modal penting dalam mendorong adaptasi dan keberlanjutan kolaborasi, meskipun masih perlu diperkuat agar lebih optimal.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan maka saran dan rekomendasi sebagai tindak lanjut atas berbagai temuan adalah sebagai berikut:

### **1. Penggerakan Prinsip Bersama**

Aktor pemerintah seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga perlu memperkuat komunikasi inklusif secara rutin dan berperan sebagai fasilitator yang setara dalam kolaborasi, sementara aktor non-pemerintah harus aktif

mendorong dialog konstruktif serta memastikan aspirasi mereka terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

### **2. Motivasi Bersama**

Aktor akademisi perlu memetakan potensi dan merancang pengembangan pariwisata gastronomi secara strategis, sementara seluruh aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, perlu memperjelas peran secara formal, melakukan evaluasi rutin, dan menyepakati definisi bersama tentang pariwisata gastronomi agar memiliki pemahaman yang sama.

### **3. Faktor Sumber Daya**

Aktor Pemerintah, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga perlu mempertimbangkan mengalokasikan anggaran khusus untuk kolaborasi Pariwisata Gastronomi dan membangun kemitraan dengan swasta serta perlu mendorong penciptaan pariwisata berkelanjutan dengan cara pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki serta melakukan monitoring intensif setelah melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pelatihan.

### **4. Faktor Institusi**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga sebagai aktor yang menjadi fasilitator dalam kolaborasi perlu melakukan penguatan relasi horizontal dengan cara seperti mengembangkan platform digital kolaborasi memfasilitasi komunikasi peer-to-peer antar aktor non-pemerintah serta perlu membangun sistem Akuntabilitas yang partisipatif dengan melakukan publikasi progress program, penggunaan anggaran, dan capaian indikator secara transparan yang menjadi pertanggungjawaban kepada aktor non-pemerintah dan publik

##### 5. Faktor Lingkungan

Aktor Pelaku Usaha Gastronomi dan pihak Komunitas Masyarakat Duta Gastronomi Salatiga perlu melakukan bounding antar anggotanya agar mampu maksimal mengemban tanggungjawabnya masing-masing untuk kemudian mampu mengembangkan Pariwisata Gastronomi di Salatiga dengan lebih konsisten meskipun terjadi perubahan kepemimpinan sekalipun.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agatha, S., & Pratama, A. Y. (2025). *Model Hexahelix sebagai Strategi Pengembangan Eco-Cultural Tourism di Kabupaten Malang:*

*Studi pada Destinasi Wisata Gastronomi Tomboan Ngawonggo.* 6(2).

Agung, M. F. M. (2025). *STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REFORMASI PELAYANAN PUBLIK. 11.*

Apalso, M. A., & Setyowati, K. (2022). *PENGEMBANGAN PARIWISATA KREATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE STUDI DI KAMPUNG BLANGKON POTROJAYAN KELURAHAN SERENGAN KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA. Jurnal Administrasi Publik,* 13(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v13i2.15392>

Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative governance: Dalam perspektif administrasi publik.* Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Press.

Buladja, R. K. (2020). *Potensi Pengembangan Pariwisata Kota Salatiga Sebagai Destinasi Wisata Kota Kreatif.* <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/20734>

Dr. Ni Putu Tirka Widanti. (2022). *Prinsip Administrasi Publik.* Jagat Langit Sukma.

Dr. Tona Aurora Lubis, S.E., M.M, Addion Nizori, S.TP., M.Sc., Ph.D, Drs. Firmansyah, M.E., Erwita Dewi, S.E. M.M., & Maryati Ningsih, S.E. (2022). *Gastronomi Sebagai Penopang Pariwisata.* Penerbit Salim Media Indonesia.

Faizal Riza Kasransyah. (2021). *ANALISIS PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN STRUKTUR ORGANISASI*

- TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANJAR. *KINDAI*, 17(3), 362–372.  
<https://doi.org/10.35972/kindai.v17i3.620>
- Fatmawati & Nur Muqni Melliyani Harahap. (2024). Collaborative Governance Dalam Revitalisasi Wisata Danau Toba Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara. *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 45–55.  
<https://doi.org/10.58794/sumur.v2i2.922>
- aHendayana. (2023). Kota Salatiga Menuju Kota Gastronomi. 2(4), 67–69.  
<https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i1.102>
- Herawati, D., Astuti, W., & Rini, E. F. (2020). KESIAPAN KOTA MADIUN TERHADAP PENERAPAN KONSEP KOTA KREATIF GASTRONOMI. *Desa-Kota*, 2(2), 143.  
<https://doi.org/10.20961/desa-kota.v2i2.12940.143-157>
- Indrayani, I. A. D., Prabawati, N. P. A., & Yudartha, I. P. D. (2024). Collaborative Governance Berbasis Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Wisata Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1).  
<https://doi.org/10.61292/eljbn.151>
- Jumaah, S. H., Dewi, D. C., Kartini, F., & Benita, N. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE BERBASIS PENDEKATAN PENTA HELIX STAKEHOLDER DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 130–138.  
<https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.264>
- Khaliq, K., Asrifai, A., & Bahri, S. (2025). *DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DONGGALA*. 2(2).
- Lusiana, M., & Candradewini, C. (2024). *DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA BEKASI*. 16(1).
- Maulana, M. F. A., Putri, S. W., & Ariesmansyah, A. (t.t.). *Analisis Collaborative Governance di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung*.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (41 ed.). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Nababan, S., Azizah, A. N., & Purnamasari, H. (t.t.). *Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung dalam collaborative governance*.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19 ed.). Penerbit Alfabeta.
- Prof. Dr. Yeremias T. Keban, SU, MURP. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu* (3 ed.). Penerbit Gava Media.
- Putra, M. K. (2021). *Identitas Gastronomi dan Perspektif Pariwisata yang Berkelanjutan*. 26(1).
- Rahayu, R. D., & Pramitasari, A. (2024). *Collaborative Governance Pentahelix ABCMG+ dalam Pengelolaan Program Bank Sampah di Kota Bekasi*.
- Ratnaningtyas, E. M., Syafruddin, Ramli, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq Ari Nugroho, Karimuddin, Muhammad Habibullah Aminy, Nanda Saputra, Khaidir, & Adi Susilo Jahja. (2023). *Metodologi*

- Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. [https://www.researchgate.net/publication/370561417\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Kualitatif](https://www.researchgate.net/publication/370561417_Metodologi_Penelitian_Kualitatif)
- Rudiansah, B. (2024). Model Collaborative Governance Penataan Kawasan Wisata. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 24(3), 241–248. <https://doi.org/10.31599/zn8c4f02>
- Sabam, H., Tahir, I., & Dione, F. (2026). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA ARUK. 12(1).
- Sadabadi, A. A., Rahimirad, Z., Shahi, N., Nikijoo, I., & Jafarian, F. (2025). Navigating solar energy transitions in oil-rich countries: A network-based study of collaborative governance in Iran. *Energy Research & Social Science*, 127, 104283. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104283>
- Widyastuti, A. E. S. (2025). *Pentingnya Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah: Studi Kasus Mekanisme Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste di TPS Go-Sari dan TPA BLE Banyumas*.
- Widyawan, I., Bakti, I., Enjat Munajat, M. D., & Novianti, E. (2024). Pengembangan Potensi Atraksi Wisata Gastronomi Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Lokal di Kampung Lembur Sawah, Kota Bogor. *Panggung*, 34(3), 297–314. <https://doi.org/10.26742/panggung.v34i3.3555>
- Yasintha, P. N. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN GIANYAR. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.219>
- Yendi, A. (2020). Collaborative Governance Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.36917/japabis.v2i2.25>
- Zaenudin, & Astuti, R. S. (2025). *DINAMIKA KOLABORASI DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KOTA BOGOR*.
- Ziza, N. (2024). *KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN KOTA SALATIGA DALAM MEWUJUDKAN KOTA KREATIF GASTRONOMI* [Universitas Diponegoro]. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/24009>